

Negara Industri Baru di Asia Tenggara

Analisis Kasus Singapore

Oleh : Syafaruddin Alwi,

Pengantar

Dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terutama yang tergabung didalam ASEAN, Singapore merupakan satu-satunya negara yang saat ini telah digolongkan sebagai Negara Industri Baru, melalui strategi yang dijalankannya yaitu strategi Industrialisasi yang berorientasi ekspor. Terlepas dari berbagai perdebatan tentang pro dan kontra akan penggolongan ini, tulisan ini ingin menampilkan pembahasan mengenai pengalaman Singapore dalam membangun perekonomiannya. Pembahasan ini terdiri dari empat bab, yang dibagi sebagai berikut; Bagian I, menguraikan tentang latar belakang dan masalah yang dibahas. Bagian II, menguraikan tentang konsep Asia Tenggara dimana Singapore dibangun ekonominya. Bagian III, membahas tentang strategi berorientasi ekspor di Singapore dalam kajian ekonomi-politik. Dan bagian IV, penutup.

I

Tulisan ini mencoba membahas tentang pengalaman Singapore sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil membangun perekonomiannya dari bersifat **entrepot tradisional** menjadi **negara industri yang kompetitif** (Russel H. Fifield). Analisis ditujukan terutama pada

strategi **Orientasi ekspor (OE)** yang dijalankan oleh Singapore yang dicanangkan pada masa pertumbuhan tinggi sekitar tahun 1960-an dan pertengahan 1979-an, yaitu ketika sistem perekonomian bergeser kearah integrasi yang lebih besar dalam perekonomian global, menggantikan strategi **substitusi impor (SI)** yang berorientasi kedalam. Strategi **Orientasi Ekspor** telah mengantarkan negara ini pada status yang digolongkan sebagai kelompok negara industri baru di Asia. Analisis tentang hal ini akan dikaitkan pula dengan sistem politik yang dijalankan Singapore yang diduga, banyak mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut.

Fenomena negara-negara industri baru atau **newly industrilizing countries (NIC)** Asia, merupakan perkembangan yang menarik dari kelompok negara-negara Dunia Ketiga khususnya negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Sebab kemunculan **NIC** di Asia, memberikan pelajaran bagi negara-negara Asia Tenggara khususnya yang tergabung dalam ASEAN (kecuali Singapore yang merupakan salah satu dari **NIC** Asia), bahwa integrasi dalam sistem internasional melalui orientasi ekspor, belum tentu menyebabkan keterbelakangan yang terus menerus sehingga keberhasilan tersebut telah

H. Syafaruddin Alwi, SE, MSi adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

menghancurkan argumentasi aliran perspektif **dependensia** dan aliran "**pesimisme ekspor**" yang beredar tahun 1950-an dan 1960-an. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan kelompok negara yang umumnya pernah mengalami masa penjajahan (kecuali Thailand), sehingga dengan keterbelakangan yang melekat pada karakteristik pembangunan ekonomi yang dijalankan, sukar untuk membayangkan melalui cara apa agar kelompok negara di wilayah ini keluar dari lingkaran negara terbelakang dan masuk pada lingkungan negara industri baru.

Pada kenyataannya memang telah muncul beberapa negara dari kelompok Dunia Ketiga yang menjadi NIC dalam waktu yang berbeda seperti Brasilia, Argentina, Chili dan Meksiko di Amerika Selatan dan Tengah. Israel dan Turki di Timur Tengah. Kemudian Hongaria dan Yugoslavia di Eropa Timur, dan terakhir di Asia.

Singapore merupakan salah satu dari negara industri baru¹ selain Hongkong, Korea Selatan, dan Taiwan, yang dikenal sebagai kelompok "**empat**" di Asia dan termasuk salah satu negara yang berpendapatan per kapita paling tinggi setelah Jepang. Sedangkan untuk wilayah Asia Tenggara, Singapore termasuk negara kota (city state) yang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya tetapi mampu mengembangkan dan memajukan industrialisasi lewat program-program pemerintah yang aktif dengan mengadopsi suatu strategi perkembangan yang berorientasi ekspor (ekspor-led industrialization). Dalam kaitan ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dari pembangunan ekonomi negara ini yaitu;

sebagai bekas jajahan Inggris, tadinya Singapore termasuk negara terbelakang yang pernah menjalankan program substitusi impor (SI), yang tergolong singkat jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang sosialis untuk kemudian menjalankan strategi yang berorientasi ekspor. Oleh sebab itu tulisan ini utamanya mengacu kepada **kasus Singapore** dalam perbandingannya dengan Hongkong yang juga merupakan negara kota yang telah memasuki fase negara industri baru di Asia. **Pertanyaan penting** dalam hal ini adalah, **pertama**, mengapa strategi orientasi ekspor (OE) merupakan kebijaksanaan yang berhasil dijalankan oleh Singapore sehingga mendorong negara ini menjadi salah satu dari NIC di Asia yang belum sepenuhnya berhasil dijalankan oleh negara-negara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand. Thailand sebagaimana telah disinggung, diharapkan menyusul dalam waktu "**dekat**" sebagai anggota NIC. **Kedua**, sejauh manakah faktor-faktor non-ekonomi seperti ideologi dan sistem politik berperan dalam mendukung keberhasilan Singapore.

Dua masalah ini dianggap penting untuk memperoleh gambaran bagaimana pemerintah Singapore pada masa

¹ Beberapa ahli antara lain Yoshihara Kunio, dalam tulisannya mengenai Kapitalisme Semu di Asia Tenggara (1990), tidak sependapat tentang Singapore telah masuk dalam kelompok NIC karena walaupun Singapore telah menikmati pertumbuhan yang pesat sampai awal tahun 1980-an, dan mencapai suatu tingkat pendapatan yang tinggi, namun Singapore telah menderita laju pertumbuhan yang rendah bahkan negatif pada tahun 1985, padahal NIC Asia lainnya menikmati pertumbuhan yang tinggi.

kepemimpinan Lee Kuan Yew, mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dalam ketiadaan sumber daya alam yang cukup, jumlah penduduk yang kecil, dan dengan luas wilayah yang sempit, yang dengan kondisi seperti ini, jika mendasarkan pada teori pertumbuhan, kecil kemungkinan bagi Singapore untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pengkajian tentang Singapore cukup menarik bagi sarjana-sarjana yang mendalami masalah-masalah ekonomi politik khususnya untuk kawasan Asia Tenggara dengan beberapa alasan; pertama, Perkembangan Singapore yang akan datang nampaknya akan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal (negara tetangga). Konflik Indo China, pengaruh ekonomi dunia, sehingga Singapore akan menghadapi problem bagaimana melanjutkan program industrialisasi (Mohtar Maso'ed 1991), dalam lingkungan ekonomi intern dan ekstern. Pada hal strategi yang berorientasi ekspor sangat rentan terhadap faktor internasional. Kedua, iklim perdangan internasional yang semakin menantang dengan terjadinya perubahan pola hubungan perdagangan antar negara dalam sistem internasional, memaksa setiap negara Dunia Ketiga untuk menjalankan strategi ekspor yang lebih intensif, terutama bagi negara yang melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan perspektif neo-klasik yaitu strategi yang berorientasi pertumbuhan. Dalam hal ini kasus Singapore bisa dijadikan pelajaran. Ketiga, kasus Singapore cukup unik jika dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya karena tahapan pembangunan menyerupai negara-negara NIC Asia Timur Laut, dalam industrialisasi

yang berorientasi ekspor. Dalam hal ini penting bagi keberhasilan negara-negara di Asia Tenggara lainnya khususnya yang tergabung dalam ASEAN, karena keberhasilan Singapore tersebut akan membawa efek positif bagi kerjasama regional terutama bagi kepentingan perdagangan sesama anggota ASEAN. Munculnya ASEAN tentunya tidak lepas dari sejarah panjang timbulnya sebutan Asia Tenggara sampai saat ini.

II

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di Asia yang banyak menarik perhatian ilmuwan politik maupun ilmuwan ekonomi karena negara-negara di kawasan ini terutama yang beraliran non-komunis yang tergolong didalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) seperti Indonesia, Singapore, Filipina, Malaysia, Thailand dan terakhir Brunei mempunyai kekuatan politik dan ekonomi yang menentukan di kawasan ini. Konsep Asia Tenggara sebenarnya merupakan konsep yang berkembang sejak Perang Dunia Kedua.

Russell H. Fifield menjelaskan bahwa studi tentang Asia Tenggara telah dimulai sejak lama sehingga pengertian tentang konsep Asia Tenggara sudah menjadi ekspresi standar didalam literatur dan diplomasi sejak perang dunia kedua. Istilah Asia Tenggara (Southeast Asia) digunakan dalam literatur ilmiah terutama secara geografi dan antropologi, untuk beberapa waktu lalu sebelum berakhirnya PD II di tahun 1939. Asia Tenggara pada waktu itu tidak merupakan daerah atau konsep kolektif namun makin berkembang berasosiasi dengan sebutan itu setelah PD II. Peran Inggris dalam pengembangan

konsep Asia Tenggara tidak bisa diabaikan. Keberadaan Komando Mounbatten di South East Asia/SEA, 1943-1945, dengan sesudah tugas penyerahan diperpanjang tahun 1946, menyebabkan London mempertimbangkan lebih hati-hati problem daerah-daerah diluar Burma, Malaya dan Borneo Inggris. Mounbatten mendapati bahwa berperang melawan Jepang melibatkan sejumlah pertimbangan tetapi pengaturan penuh daerah ini membawa masalah ekonomi dan politik ke garis depan.

Nama ini pada mulanya berasal dari Komando Asia Tenggara tahun 1943 dibawah Komando Admiral Mounbatten. Selama PD II nama ini menjadi baku dan istilah praktis termasuk di AS. Institute of Pacific Relation yang berdiri di Honolulu tahun 1925, memainkan peran penting dalam evolusi nama atau konsep SEA ini, sebelum Jepang menyerang Pearl Harbor tahun 1941, belum lagi pendirian Komando Asia Tenggara Mounbatten tahun 1943. Setelah AS memasuki PD II, institute ini melakukan sejumlah studi tentang problem sosial, ekonomi dan politik SE. Dan dalam tahun 1940, Wiliam L. Holand menyusun serangkaian laporan penelitian dan juga tahun 1942. Semua mereka menggunakan SEA dalam topik mereka. Barangkali buku yang mempopulerkan penggunaan istilah SEA bersama membuat kontribusi utama terhadap konsep ini adalah buku K.M Panikkar yang berjudul *The Future of South-East Asia*, diterbitkan di New York tahun 1943.

Penciptaan Komando SEAC oleh Presiden Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Winston S. Churchill, pada Konferensi Quebec pertama Agustus 1943, merupakan langkah utama dalam

identifikasi militer dan politik dari daerah tersebut. Inggris ingin daerah Indo China Perancis masuk dalam komando tetapi Roosevelt menganggap jika Thailand sudah termasuk Indo China. Pandangan Mounbatten sebagai pemegang supremasi komando sangat kontroversial dengan Jenderal Josep W. Stillwell, Kepala Staf Chiang Kai Shek sebagai wakil komando.

Dalam laporan akhir Kepala Staf gabungan kepada Roosevelt dan Churchill 24 Agustus disetujui oleh kedua pemimpin itu Komando Asia Tenggara meliputi Burma, Thailand, Malaysia, Singapore dan Sumatera. Mounbatten beberapa tahun kemudian berkomentar tentang penggunaan istilah SEA dalam South East Asia Command. Ketika ia sebagai Kepala Staf Gabungan dan anggota Staf Committee, ia dan koleganya menghadapi problem apa istilah daerah yang diserbu Jepang sehingga kekalahan sekutu? Didalam diskusi sampai kepada secara geografis disebut sebagai SEA. Istilah ini kemudian menjadi kelaziman.

Singapore dalam konteks sejarah perkembangan konsep Asia Tenggara seperti yang telah diuraikan dimuka, jelas sekali merupakan negara anggota kawasan ini yang berada dibawah kepemimpinan Inggris, yang telah meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi politik Singapore pada awalnya. Inggris telah meletakkan kekuatan ekonomi-politik Singapore sebagai negara transit bagi perdagangan regional (regional entreport) yang kemudian setelah negara ini merdeka, berkembang sebagai kota transit dan industri bagi perdagangan internasional.

Untuk memahami Singapore dilihat dari segi perkembangan ekonominya harus

tidak dipisahkan dari sejarah industrialisasi dinegara ini yang dimulai dari kondisi Singapore sebagai basis perdagangan, memasuki fase transisi, kemudian mulai melaksanakan strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor. Dan sebagai perbandingan dapat digunakan Hongkong yang juga merupakan negara kota. Untuk memahami bagaimana Singapore mengalami fase transisi dari menjalankan strategi Substitusi Impor ke strategi Orientasi Ekspor ini, tulisan Stephen Haggard (1990), dalam "Pathways From The Periphery", dapat dijadikan acuan.

Singapore didirikan pada tahun 1918. Singapore pada mulanya berfungsi sebagai transshipment point bagi perdagangan dengan Asia Timur. Daerah ini kemudian menjadi wilayah entreport dibawah kekuasaan Inggris. Kebijakan ekonomi Singapore dinilai sangat bersifat intervensionis. Pemerintah memperluas insentif fiskal dan finansial, dan juga secara intensif mengintervensi pasar tenaga kerja. Berbeda dengan Hongkong yang menerapkan perekonomian laissez faire. Perbedaan lain dengan Hongkong adalah Singapore melibatkan peran yang dimainkan oleh multi nasional corporation. Singapore sangat mengandalkan investasi asing yang lebih besar dari pada Korea, Taiwan atau Hongkong dimana perusahaan lokal menjadi pelopor industrialisasi. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan perbedaan itu. **Pertama**, kemampuan dari sektor manufaktur domestik lemah dan lebih banyak pada jasa. **Kedua**, Hongkong tidak mengalami strategi Substitusi Impor untuk sampai pada pelaksanaan strategi Orientasi Ekspor. Dengan istilah Russel, menjalani fase Substitusi Impor Tersembunyi. Industri

di Hongkong sangat terkait dengan industri di Shanghai.

Strategi industri orientasi ekspor dilaksanakan oleh Singapore pada awalnya pada sekitar pertengahan tahun 1960-an, yang kemudian diikuti oleh Malaysia, Thailand, pada akhir tahun 1960-an dan kemudian terakhir oleh Indonesia pada awal tahun 1980-an. Perubahan strategi yang dijalankan oleh Singapore ini yaitu dari strategi substitusi impor ke strategi orientasi ekspor nampaknya disebabkan oleh beberapa faktor. **Pertama**, strategi substitusi impor dianggap telah gagal melahirkan pertumbuhan hasil industri manufaktur dan kesempatan kerja secara berkesinambungan sehingga barang-barang pengganti impor tidak dapat merembes masuk ke pasar ekspor seperti yang diharapkan. **Kedua**, berkaca negara-negara Asia Timur Laut yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui industrialisasi yang dipacu ekspor karena iklim perdagangan internasional semakin membuka kesempatan bagi negara Dunia Ketiga termasuk Singapore untuk memasarkan produk-produk manufaktur. **Ketiga**, dorongan dari para intelektual yang menganggap pentingnya ekspor sebagai hasil dari studi yang dilakukan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 1960-an dan National Bureau of Economic Research (NBER), pada tahun 1970-an.

Perubahan strategi itu menimbulkan implikasi ekonomi-politik bagi negara yang menjalankannya sebab umumnya negara Dunia Ketiga tidak memiliki industri "Teknologi" sehingga industri yang berkembang di negara-negara tersebut tetap merupakan industri yang berada dalam

kendali industri induk di negara maju melalui multinational cooperation. Disamping itu, konsekuensi yang dihadapi oleh negara yang melaksanakan strategi ini, ketergantungan kepada modal asing semakin besar. Ciri ini juga terdapat pada negara-negara Asia Tenggara termasuk Singapore, sehingga untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan perdagangan negara-negara di Asia Tenggara disamping menggunakan perspektif teori-teori pembangunan modern, juga relevan untuk menggunakan perspektif alternatif yaitu perspektif ketergantungan².

Untuk menganalisa Singapore dalam hubungan dengan strategi Orientasi Ekspor ini lebih tepat jika menggunakan perspektif teori pertumbuhan karena strategi Orientasi Ekspor merupakan bagian dari teori ini. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh **Arthur Lewis** pada tahun 1950-an, kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi lainnya seperti **Gerald Meir**, **H. Myint**, dan **P.T. Bauer**. Walaupun teori ini dikembangkan bersama-sama, namun tidak ada keseragaman pandangan diantara mereka bagaimana pertumbuhan dapat dicapai. Sebagai contoh, **Bauer** menekankan pada kekuatan pasar. Sedangkan **Lewis** dan **Seers**, yang mengadopsi pendekatan model Keynesian, mengembangkan **Model Harold** dalam pembangunan ekonomi. Strategi Orientasi Ekspor jelas dikembangkan atas dasar kekuatan pasar yang kadang-kadang menghadapi kendala berupa proteksi dari negara maju. Disamping itu didalam negeri, negara pemilu 1968 maka dimulailah konsolidasi dan evaluasi sistem politik dari sistem politik multi partai (1950), menjadi dominasi kekuasaan satu partai (1960), yaitu

dominasi kekuasaan PAP. Ini disebabkan ketidak mampuan partai oposisi untuk merekrut pemimpin yang mampu bersaing dengan PAP.

Dengan masyarakat yang bersifat multi-rasial dominasi PAP ini tidak bisa diartikan negatif karena dominasi ini memungkinkan bagai partai untuk melakukan nation building, state building dan political economic development secara utuh. Dengan karakteristik seperti itu pemerintah harus mampu menciptakan harmoni dan toleransi diantara masyarakat. Oleh sebab itu PAP tidak mau menjalankan strategi nation building yang berdasarkan etnis. Strategi nation building, dilakukan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi (selain Melayu) dan tidak berdasarkan etnik. Singapore adalah kota perdagangan sehingga bahasa resmi lebih baik bahasa Inggris (90%). Dalam nation building perlu penanaman nilai-nilai dan sistem yang dipercaya. Problem Singapore adalah bagaimana membuat Singapore modern dan industrialisasi dapat berlangsung. Pemegang kekuasaan nampaknya menyadari sepenuhnya bahwa untuk membentuk dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, diperlukan political community yang kohesif. Oleh sebab itu perlu pendekatan pengajaran agama dan menghidupkan konfesionisme. Berdasarkan tujuan itu integrasi kultural di Singapore berjalan baik dalam tahun 1980-an sampai 1990-an. PAP menyadari bahwa persatuan nasional tidak akan terwujud

2 Lihat Richard Higgot and Richard Robinson, *Theories of Development and Underdevelopment: Implication For The Study Of Southeast Asia*, Murdoch University, Australia, 1985, p. 16-17

tanpa dukungan Melayu dan komunitas lain (negara tetangga mayoritas Melayu).

Sistem politik Singapore berbeda dengan negara lain sesama anggota ASEAN yang disebut Clifford Geertz sebagai baru, dengan masyarakat baru dan sekuler walaupun sistem politiknya modern. Secara ekonomi Singapore merupakan negara kota yang mengembangkan entreport trade city pada awalnya dengan dukungan imigran dengan mayoritas China. Guna mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, negara ini berambisi untuk tidak hanya sebagai entreport tetapi juga mengembangkan sektor manufaktur yang kompetitif di pasar internasional. Oleh sebab itu selama tahun 1960-1970, para pemimpin politik menempuh strategi lebih mengkonsentrasikan lebih pada pembangunan ekonomi dan kurang pada pembangunan politik khususnya politik partisipasi. Problem politik pada tahun 1980 adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara liberalisme dan benevolent paternalisme. Tetapi hampir semua masyarakat Singapore lebih suka pemerintah yang kuat karena demokrasi hanya akan menimbulkan instability (Mohtar Maso'ed, 1991).

Berdasarkan keadaan ini pemerintah PAP lebih leluasa menjalankan kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan strategi ini. Hal ini terlihat pada berbagai kebijaksanaan yang mengikuti pelaksanaan strategi ini seperti, mengurangi persentasi pajak atas keuntungan menjadi 4% dari 40% yang ditetapkan oleh Undang-undang Insentif Ekspansi Ekonomi tahun 1967. Kemudian konsensi pajak lain juga diberikan seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan

dari perlengkapan modal. Meskipun tarif atas beberapa bea impor masih tinggal, beban kuota impor berangsur-angsur dikurangi. Sebagaimana diketahui Singapore selama tahun 1965-1967, melakukan pembatasan impor dan tarif protektif untuk melindungi strategi Substitusi Impor yang dijalankan.

Disamping itu pemerintah Lee Kuan Yew dengan kekuasaan melalui PAP yang dominan, telah melakukan intervensi langsung untuk memajukan industri-industri teknologi tinggi yang mendukung strategi itu. Intervensi ini juga dilakukan oleh Taiwan. Sebagai konsekuensinya pemerintah Singapore menetapkan kebijaksanaan melalui undang-undang tentang penambahan upah kemanufakturan sebesar 20% untuk menggalakkan industri padat modal.

Faktor non-politik yang tidak kalah pentingnya yang mendukung kebijaksanaan strategi Orientasi Ekspor adalah faktor ideologi yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Singapore yaitu ajaran Konfucionisme. Konfucionisme, diyakini telah membawa pengaruh. Dibawah pengaruh ajaran konfucionisme yang lebih siap untuk menerima suatu pemerintah absolut dan suatu sistem hierarki. Pemerintah NIC Asia sebagai perbandingan semuanya efektif dan autokratis dalam berbagai cara. Walaupun mungkin ini tidak bisa digeneralisasikan bahwa keberhasilan harus dibawah pemerintah autokratis tetapi fakta telah menunjukkan hal itu. Di Singapore jelas pemerintah yang dipimpin Lee Kuan Yew yang seorang negarawan yang "dihasilkan" oleh pemerintah kolonial, dengan kekuasaan otoritemya telah berhasil

membawa Singapore menjadi Negara Industri Baru.

IV

Berdasarkan uraian di muka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pemerintah PAP telah berhasil melaksanakan nation building, state building, sehingga dapat mendukung kebijaksanaan ekonomi politik pembangunannya. Dalam kaitan dengan pelaksanaan Strategi Orientasi Ekspor, Singapore terlebih dulu menciptakan iklim politik yang favorable dalam pembangunan bangsa sehingga menimbulkan sikap positif bagi rakyat, walaupun diciptakan melalui sistem politik yang otoriter dan kebijaksanaan ekonomi yang intervensionis. Keberhasilan ini jelas dapat diamati sebagai akibat terbentuknya interaksi antara absolutisme, konfusionisme dan kapitalisme. Namun tidak dapat dihindari, karena Singapore merupakan mayoritas etnis China, keberhasilan ini telah menimbulkan analisis lain yaitu seandainya Singapore bukan mayoritas China, maka mungkin negara ini tidak akan sampai pada taraf seperti sekarang. Kesimpulan ini tentunya tidak beralasan sebab yang lebih penting adalah faktor interaksi antara kepatuhan rakyat Singapore terhadap kebijaksanaan pemerintah, dan keseriusan pemerintah menjalankan program industrialisasi lebih dominan sebagai pendukung keberhasilan. Namun demikian tidak mengejutkan

jika kesimpulan tulisan ini bahwa kita tidak optimis tentang masa depan ekonomi Singapore karena sifat ketergantungannya pada industri-industri asing dan kapitalisme internasional melalui multinasional corporation. Tetapi mungkin dengan ketahanan politik Singapore yang relatif kuat, Singapore dapat memecahkan problem ini, dan dapat mengimbangi perkembangan situasi perdangan internasional yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan negara maju termasuk regionalisasi perdagangan internasional yang terjadi.

Referensi:

- John G. Taylor And Andrew Turton (Ed), Southeast Asia: Sociology of Developing Societies, Monthly review, 1988.
- Jon S.T. Quah Cs (Ed), Government And Politics of Singapore, Oxpond University Press, 1987.
- Mohtar Mas'oeed, Bahan-bahan Kuliah Politik Asia Tenggara, 1991.
- Pang And Chan, The Political Economy of Development in Singapore, 1959-1985, ISEAS, 1986.
- Russell H. Fifield, Southeast Asia as A Regional Concept, 1975
- Stephen Haggard, Partways From The Periphery, The Politics of Growth in The Newly Industrializing Countries, Cornell University Press, 1990